

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Acmad Ali, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, Kencana.

Danil, Elwi, 2021, "Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya", PT. RajaGrafindo Persada.

Dessler, Gary, 2015, "Manajemen sumber daya manusia." Jakarta: salemba empat.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Refika Aditama.

Hartatik, I. P. 2014. Buku Pintar Membuat SOP. Yogyakarta: Flashbooks

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana.

Kenedi, John, 2019, "Buku Perlindungan saksi danm Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia.", Pustaka Pelajar.

Nandang Alamsah dkk, 2018, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Bandung: Unpad Press.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati, 2019 Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.

Philiphus M. Hadjon, dkk., 2012, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua, Yogyakarta,: Gajahmada University Press

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020. Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.

Rosdakarya Musanef, 2007, "Manajemen Kepegawaian di Indonesia", Jakarta, Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan kum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.



, Tedi, 2022, "Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan atatan", Jakarta, Sinar Grafika.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung, Rajawali Press.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan." Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang, 2022, "Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi." Sinar Grafika.

Jurnal

Anggraeni, dkk, 2021, "Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan". Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol 14.1.

Barus, Sonia Ivana, 2022, "Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 11.2.

Bhattacharya, J., & Phill, M. 2015. Guidance for preparing standard operating procedures (Sops). IOSR Journal of Pharmacy, 5(1), 29-36

Bujung, A. R. (2023). Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. LEX ADMINISTRATUM, 11(1).

Cahyani, Mutiara Gita, and Rahmania Ramadhani, 2023, "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2.1.

Enrico Parulian Simanjuntak, 2018, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi merintahan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Ditjn Badan Peradilan iter dan Tata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No.2.



Enrico Parulian Simanjuntak, 2018, "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Ditjn Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No.2.

Fadilah, Rizki Muhamad, and Roy V. Salomo, 2023, "OPTIMALISASI PENERAPAN WHISTLEBLOWER-SYSTEM (WBS) DI SEKRETARIAT KABINET." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 7.2.

Hariyani, Eka, Adhitya Agri Putra, and Meilda Wiguna, 2019, "Pengaruh Komitmen Profesional, Pertimbangan Etis, Personal Cost, Reward Terhadap Intensi Internal Whistleblowing (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Siak)." Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Vol. 12.2.

Kaloh, Inggrid, 2023, "Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan." LEX PRIVATUM Vol. 11.2.

Majid, Jamaluddin, et al, 2022, "Motivasi Whistleblower: Mengungkap Fraud Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma'ruf nahi Mungkar." Journal of Finance and Business Digital 1.1.

Masyita, Sitti, 2016, "Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Masyarakat untuk Pembuatan E-KTP pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros" Jurnal Ilmiah Bongaya 1.1.

Maulana, Ahmad Affan, and Angga Pratama, 2022, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Pemerinah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi." Jurnal Anti Korupsi 12.1.

Nabilla, D. R. 2022. Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN Svstem (PT Global Sukses Solusi Tbk). Selektta Manajemen: Jurnal hasiswa Bisnis & Manajemen.

Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice



- Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal* 1, no. 2.
- Orlando, G. 2022k. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*.
- Philiphus M. Hadjon, dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Good Governace*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Kedua.
- Pio, Elim Riedel Christmas, 2019, "Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya." *Lex Administratum* 6.4.
- Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi, et al, 2021, "Pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap tindak kecurangan dengan independensi sebagai moderator." *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*.
- Putra, I. Komang Agus Wira, and Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali Di Wilayah Desa Adat Kuta." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2.1.
- Rahman, Abdul, and Riani Bakr, 2019. "Penataan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dynamic governance." *Jurnal Konstituen* Vol. 1.1.
- Sari, Ni Kadek Indah Yunia, Ni Komang Sumadi, and Ni Made Endra Lesmana Putra, 2023, "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Penegakan Hukum terhadap pencegahan kecurangan (FRAUD) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Kerambitan." *Hita Akuntansi dan Keuangan* Vol. 4.3.
- Shawver, T. J., & Shawver, T. A, 2018, "The impact of moral reasoning on whistleblowing intentions. In *Research on professional responsibility and ethics in accounting*." Emerald Publishing Limited.



- Solechan, S., 2019, Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3).
- ati, Agustina, Edy Sujana, and Adi Yuniarta, 2019, "Pengaruh mpetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng)." JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol. 10.3.

Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Muliati, and Putu Deddy Samtika Putra, 2022, "Pengaruh Whistleblowing dan Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan dengan Moderasi Moralitas di LPD Se-Kota Denpasar." Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 18.2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang no. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah.



Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal 6 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

Skripsi/Tesis

.Kur'aini Nur Diana, 2022, "*Whistleblowing System* dan Lingkungan Pengendalian dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dimoderasi Perilaku Etis", Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Nur Khairini, 2022, "Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021", Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Eggy Saputra, 2022, "Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui *Whistleblowing System*", Skripsi, Universitas Ekasakti.

Website

Cindy Mutia Annur, 2021, diakses 23 September 2023, "ICW: Pelaku korupsi Terbanyak dari Kalangan ASN pada Semester 1 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021#>.



Dita Angga Rusiana, 2021, diakses pada 20 November 2023, “BKN: Banyak PNS Masih Bekerja Meski Putusan Pidana Korupsi Sudah Inkrah”, BKN: Banyak PNS Masih Bekerja Meski Putusan Pidana Korupsi Sudah Inkrah (sindonews.com).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, diakses pada 9 November 2023, “WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS): Langkah Awal Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, <https://setkab.go.id/whistleblowing-system-wbs-langkah-awal-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/>.

Hukumonline, 2022, diakses pada 18 November 2023, Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

Muhammad Taufiq, 2018, diakses pada 10 November 2023, <https://www.kompasiana.com/opieutopis/551c0591a33311182ab659fc/whistle-blowing>.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 848/UN4.5.1/PT.00/2024

Lampiran : -

Makassar, 26 Februari 2024

Hal : PENELITIAN

Kepada

Yth. : Kepala Badan Kepegawalan Negara Kantor Regional IV Kota Makassar
di,
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : MUH.NUR ARDANI

No. Pokok : B021201002

No. HP : -

Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara

Alamat : Paccerakang no 3

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Achmad Ruslan ,S.H., M.H.

2. Arini Nur Annisa ,S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KOTA
MAKASSAR

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL IV**

Jalan Paccarangkang Nomor 3 Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan 90241
Telepon (0411) 512011 - 512022
Laman: makassar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg4.makassar@bkn.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 22/B-OT.08.03/SD/SKP/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUSNAEDI, S.Kom., M.Tr.A.P.
NIP : 198512192011021001
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Nur Ardani
Nim : B021201002
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan judul
"Efektivitas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Wewenang di Badan Kepegawaian Negara Kota Makassar".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Mei 2024.

An. Kepala Kantor Regional IV BKN
Kepala Bagian Tata Usaha

Uk. Kepala Subbagian Kepegawaian dan
Pengelolaan Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik dengan
Kusnaedi, S.Kom., M.Tr.A.P.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

si Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
maka telah dibuat dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN







Optimized using
trial version
www.balesio.com